



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI HASIL PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH OLEH DPPKAD (DINAS PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH) KOTA  
SAWAHLUNTO SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**



**OKTA FEBRIADI  
0910533173**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2014**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

---

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **Okta Febriadi**  
No. BP : **0910533173**  
Program Studi : **Strata Satu (S-1)**  
Jurusan : **Akuntansi**  
Konsentrasi : **Perpajakan**  
Judul : **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Hasil  
Pemungutan Pajak Daerah oleh DPPKAD (Dinas  
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah) Kota Sawahlunto Sumatera Barat**

Telah disajikan dan disetujui skripsi ini melalui seminar hasil yang diadakan pada tanggal 29 Desember 2014 sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan kelaziman yang berlaku.

Padang, 23 Maret 2015

Kepala Program Studi Akuntansi

Pembimbing




**Verni Juita, SE, M.Com (Adv), Ak**  
**NIP.19790682002122004**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Dra. Warnida.

**Dra. Warnida, MM, Ak**  
**NIP.196511181992032003**



|  |   |                      |                    |
|--|---|----------------------|--------------------|
|   | No Alumni Universitas   | <b>OKTA FEBRIADI</b> | No Alumni Fakultas |
|  | <p align="center"><b>BIODATA</b></p> <p>a). Tempat/Tgl Lahir : Talawi / 18 Oktober 1990    b). Nama Orang Tua : (alm) Mardius dan Rusniati    c). Fakultas : Ekonomi    d). Jurusan : Akuntansi    e). No.Bp : 0910533173    f). Tanggal Lulus : 16 Maret 2015    g). Predikat lulus : Memuaskan    h). IPK : 2,93    i). Lama Studi : 5 Tahun 7 Bulan    j). Alamat Orang Tua: Jln. Ratin Dt. Rajo Kuaso, Talawi Hilir Kota Sawahlunto</p> |                      |                    |
| <p align="center"><b>Effectiveness and Efficiency the Results of the Poll Tax Areas by DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah) Kota Sawahlunto Sumatera Barat</b></p> <p align="center">Skripsi Oleh Okta Febriadi</p> <p align="center">Pembimbing Skripsi Dra. Warnida, MM, Ak</p> <p align="center"><b>ABSTRACT</b></p> <p><i>The objective of this research is to know effectiveness and efficiency the results of the poll tax areas by DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Sawahlunto Sumatera Barat .This study used a case study approach with descriptive percentage compare between the realization of tax areas with the target of tax revenue and compare between the total cost of the administration of tax with the realization of tax areas in the Sawahlunto. The data used are secondary data.</i></p> <p><i>The result of this research indicate that the results of the analysis of the effectiveness of the poll tax areas Kota Sawahlunto from 2009 until 2013 only restaurant tax and street lighting tax are always reach the level of effectiveness that is very effective. And the results of the analysis of efficiency of poll tax areas Kota Sawahlunto has been efficient. From 2009 to 2012 the level of achievement of efficiency is between 20 % to 85 % which means that the tax has been efficient , whereas in 2013 the level of achievement of efficiency less than 20 %, which means a poll tax areas are very efficient.</i></p> <p><i>Key Word : Effectiveness, Efficiency, Tax Areas</i></p> |   |                      |                    |



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah oleh DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Sawahlunto Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif persentase yang membandingkan antara realisasi pajak daerah dengan target penerimaan pajak dan membandingkan antara jumlah biaya administrasi pajak dengan realisasi pajak di Kota Sawahlunto. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil analisis efektivitas pemungutan pajak daerah Kota Sawahlunto dari tahun 2009 sampai tahun 2013 hanya Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan yang selalu mencapai tingkat efektivitas yang sangat efektif. Dan dari hasil analisis efisiensi pemungutan pajak daerah Kota Sawahlunto sudah efisien. Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 tingkat pencapaian efisiensi berada diantara 20% sampai dengan 85% yang artinya pemungutan pajak sudah efisien, sedangkan tahun 2013 tingkat pencapaian efisiensi kecil dari 20% yang artinya pemungutan pajak daerah sangat efisien.

Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi, Pajak Daerah.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 29 Desember 2015, dengan penguji :

|              |  |   |
|--------------|--|---|
| Tanda Tangan | 1.  | 2.  |
|              | Nama Terang      Dra. Warnida, MM, Ak  | Drs. Iswardi, MM, Ak  |

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan mendapat nomor alumnus :

|                       | Petugas Fakultas / Universitas |                |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|
| No Alumni Fakultas    | Nama :                         | Tanda Tangan:  |
| No Alumni Universitas | Nama :                         | Tanda Tangan : |



### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :  
**"Analisis Efektivitas dan Efisiensi Hasil Pemungutan Pajak Daerah oleh DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Sawahlunto Sumatera Barat"**. Merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisan yang memuat kalimat, ide, gagasan, atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika, dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan *plagiat* dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, Maret 2015

Yang membuat pernyataan

Okta Febriadi  
Bp: 0910533173

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai, membimbing, memberikan kesehatan, kekuatan, ketenangan, dan keyakinan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Hasil Pemungutan Pajak Daerah oleh DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Sawahlunto Sumatera Barat**. Shalawat tak lupa penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang menjadi inspirasi dalam menjalani hidup sehingga semangat untuk menyelesaikan skripsi ini tetap terjaga. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Tafdil Husni, SE, M.A, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas,
2. Bapak Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM. Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan Bapak Firdaus, SE, MSi, Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas,



3. Ibu Verni Juíta SE, M.Com, Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Strata-1 dan yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk melaksanakan seminar hasil skripsi,
4. Ibu Dra. Warnida, MM, Ak, selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta dengan sabar untuk membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih atas segala kemudahan dan motivasi yang telah diberikan selama bimbingan,
5. Bapak Drs. Iswardi, MM, Ak, selaku penelaah yang telah memberikan masukan dan perbaikan yang bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi,
6. Bapak Drs. Indra Suheri, Ak selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Andalas,
7. Ibu Sri Dewi Edmawati, SE, M.Si, Ak dan Bapak Firdaus, SE, M.Si, Ak selaku penguji komprehensif yang telah memberikan nasehat dan semangat untuk terus menerus belajar,
8. Almarhum Apak Mardius dan Amak Rusniati yang tidak pernah lelah untuk memberikan semangat, kasih sayang, do'a dan pengorbanan yang tidak terhingga baik moril maupun materil, terimakasih untuk setiap tetesan keringat dan perjuangan apak dan amak untuk penulis, terimakasih juga untuk uni – uni dan uda – uda ; Rosmayanti nofiti, Rahmat Syah Alam, Destin Marita, Masrial, Alfi Syukri, Aries Haryanti, Marjoni, Rika yang juga

tak henti-hentinya memberi perhatian, kasih sayang dan dukungan moril atau materil,

9. Seluruh Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, terima kasih atas ilmu yang diberikan dari awal hingga akhir, serta kepada para pegawai biro akuntansi yang telah membantu penulis dalam urusan penulis selama masa perkuliahan dan Keluarga besar Akuntansi Universitas Andalas, mulai dari alumni, senior, dan yunior yang telah membantu dan memberikan informasi dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi,
10. FriendsFams (venny, mike, novi jujup, linda, iyank, opet, winda, agus, alim, hafis, fadli) yang juga selalu memberikan semangat, kasih sayang, perhatian dan selalu menjaga kekompakan dan kegilaan hingga sudah seperti keluarga kedua,
11. Seluruh guru-guru penulis dari mulai sekolah dasar sampai penulis di jenjang perkuliahan, terima kasih atas dorongan ilmu dan motivasinya,
12. Seluruh sahabat - sahabat penulis, teman - teman Akuntansi, Puti Bamas, 3idiot (ocky dan Edo), Fauzan, Tom, Ipul yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, semangat, dukungan berbagi moment indah yang tak akan bisa dilupakan,
13. adik – adik kostn 69 (ajin.tujin, Dirga.gajah, Oky.kiting, yos) yang telah memberikan dukungan dan juga membantu menghilangkan stress di saat penulis down. Terimakasih atas kegilaannya,



14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya, skripsi ini masih perlu penyempurnaan. Semua ini karena keterbatasan pengetahuan penulis, maka saran dan kritik dari para pembaca sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dalam pengembangan ilmu.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, Maret 2015

Penulis,

Okta Febriadi  
Bp: 0910533173

## DAFTAR ISI

|   | <i>Halaman</i> |
|---|----------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....                        | i              |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | ii             |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....                                | iv             |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                       | ix             |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                     | xi             |
| <b>DAFTAR GRAFIK</b> .....                                    | xii            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                      |                |
| 1.1 Latar Belakang .....                                      | 1              |
| 1.2 Perumusan Masalah .....                                   | 5              |
| 1.3 Pembatasan Masalah .....                                  | 6              |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                                   | 6              |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                                  | 7              |
| 1.6 Sistematika penulisan .....                               | 7              |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                                |                |
| 2.1 Pendapatan Asli Daerah .....                              | 9              |
| 2.1.1 Jenis – Jenis Pendapatan Daerah .....                   | 10             |
| 2.1.2 Hasil Pajak Daerah .....                                | 10             |
| 2.1.3 Hasil Retribusi Daerah .....                            | 11             |
| 2.1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ..... | 12             |
| 2.1.5 Lain – Lain PAD yang Sah .....                          | 12             |
| 2.2 Pajak .....   | 12             |
| 2.2.1 Jenis Pajak .....                                       | 13             |
| 2.2.2 Wajib Pajak .....                                       | 15             |
| 2.2.3 Manfaat Pajak .....                                     | 15             |
| 2.3 Pajak Daerah .....  | 17             |
| 2.3.1 Jenis – Jenis Pajak Daerah .....                        | 18             |
| 2.3.2 Penjelasan Pajak .....                                  | 20             |
| 2.4 Cara Mengukur Potensi Pajak .....                         | 34             |
| 2.4.1 Pengukuran Hasil Pemungutan .....                       | 34             |
| 2.4.2 Potensi Pajak dan Target Pajak .....                    | 34             |



|  |           |
|--|-----------|
| 2.4.3 Efektivitas.....                                     | 35        |
| 2.4.4 Efisiensi.....                                       | 37        |
| 2.5 Review Penelitian Terdahulu.....                       | 37        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                           |           |
| 3.1 Objek / Subjek Penelitian.....                         | 41        |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data.....                             | 41        |
| 3.2.1 Data Sekunder.....                                   | 41        |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data.....                           | 42        |
| 3.4 Metode Analisis Data.....                              | 42        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>                |           |
| 4.1 Gambaran Umum Kota Sawahlunto .....                    | 45        |
| 4.1.1 Visi dan Misi .....                                  | 45        |
| 4.1.2 Kondisi Geografis Daerah .....                       | 46        |
| 4.1.3 Kondisi Topografi Daerah.....                        | 46        |
| 4.1.4 Iklim .....  | 47        |
| 4.1.5 Penggunaan Lahan.....                                | 47        |
| 4.1.6 Penduduk .....                                       | 47        |
| 4.1.7 Perekonomian Daerah .....                            | 48        |
| 4.1.8 Pertumbuhan Ekonomi .....                            | 48        |
| 4.2 Struktur Organisasi DPPKAD .....                       | 49        |
| 4.3 Analisis Efektivitas dan Efisiensi .....               | 50        |
| 4.3.1 Analisis Efektivitas.....                            | 50        |
| 4.3.2 Analisis Efisiensi .....                             | 62        |
| <b>BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN</b> |           |
| 5.1 Kesimpulan .....                                       | 75        |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian.....                           | 77        |
| 5.3 Saran .....  | 78        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                | <b>80</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  |           |

## DAFTAR TABEL

|   | <i>Halaman</i> |
|---|----------------|
| Tabel 4.1 Target Dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2009.....       | 50             |
| Tabel 4.2 Tingkat Pencapaian Efektivitas Tahun 2009.....          | 51             |
| Tabel 4.3 Target Dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2010.....       | 52             |
| Tabel 4.4 Tingkat Pencapaian Efektivitas Tahun 2010.....          | 54             |
| Tabel 4.5 Target Dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2011.....       | 54             |
| Tabel 4.6 Tingkat Pencapaian Efektivitas Tahun 2011.....          | 56             |
| Tabel 4.7 Target Dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2012.....       | 57             |
| Tabel 4.8 Tingkat Pencapaian Efektivitas Tahun 2012.....          | 58             |
| Tabel 4.9 Target Dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013.....       | 59             |
| Tabel 4.10 Tingkat Pencapaian Efektivitas Tahun 2013.....         | 60             |
| Tabel 4.11 Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2009 ..... | 63             |
| Tabel 4.12 Alokasi Biaya Tahun 2009.....                          | 63             |
| Tabel 4.13 Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2010 ..... | 65             |
| Tabel 4.14 Alokasi Biaya Tahun 2010.....                          | 65             |
| Tabel 4.15 Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2011 ..... | 67             |
| Tabel 4.16 Alokasi Biaya Tahun 2011.....                          | 68             |
| Tabel 4.17 Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2012 ..... | 69             |
| Tabel 4.18 Alokasi Biaya Tahun 2012.....                          | 70             |
| Tabel 4.19 Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2013 ..... | 72             |
| Tabel 4.20 Alokasi Biaya Tahun 2013.....                          | 72             |



## DAFTAR GRAFIK

### *Halaman*

|   |    |
|---|----|
| Grafik Tingkat Pencapaian Analisis Efektivitas..... | 62 |
| Grafik Tingkat Pencapaian Analisis Efisiensi .....  | 74 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah satu komponen pendapatan yang sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan bangsa. Disini pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan untuk diberikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk subsidi.

Pada era reformasi ini Negara Indonesia telah mengubah sistem perpajakan yang ada di Indonesia, yaitu sistem yang dulu terpusat beralih ke sistem pemungutan pajak daerah. Dan pemerintah hanya menerima beberapa persen dari total pendapatan pajak yang diperoleh daerah atau sering dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Pemerintah daerah baik tingkat I maupun tingkat II membuat rumusan besarnya tarif pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Akan tetapi harus melalui persetujuan dari departemen dalam negeri. Departemen dalam negeri berhak menerima atau menolak rumusan pajak daerah tersebut sesuai dengan kebutuhan.

Pendapatan ekonomi daerah khususnya Daerah Tingkat II (DATI II) merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Menurut Kuncoro (2004), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Pelaksanaan pembangunan disegala bidang berlangsung secara berkesinambungan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah pusat memalalui otonomi daerah memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk Sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Sehubungan dengan pajak, Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan dari sektor pajak melalui pungutan – pungutan yang dikumpulkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sendiri. Dasar hukumnya (kewenangannya) ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 revisi atas undang – undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber – sumber daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang – undangan.

Di dalam undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penyempurna Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Daerah dan Undang – undang 33 Tahun 2004 sebagai pengganti atas Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan, setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola, dan menggunakan sumber – sumber daya alam serta potensi – potensi lain yang terdapat didaerahnya sendiri, guna menunjang



kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan ke pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri.

Menurut Koswara (2000), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber – sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Salah satu penerimaan pendapatan asli daerah adalah sektor pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan – kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang – barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri dan dapat sebagai pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan.

Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, sesuai dengan Undang – Undang tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Untuk memperkuat penarikan pajak, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur penarikannya. Pajak ini ditarik bersamaan dengan pembayaran kepada pihak yang terkait setelah menikmati jasa pelayanan yang diberikan.

Kota Sawahlunto merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat. Kota Sawahlunto dikenal sebagai kota tambang dengan luas wilayah 27.345 Ha atau 273.45 km<sup>2</sup>. Secara administrasi terdiri dari 4 kecamatan, 10 kelurahan dan 27 desa. Jarak dari Kota Sawahlunto ke Kota Padang (ibu kota provinsi) adalah

95km yang dapat dicapai melalui jalan darat dengan kondisi baik dalam waktu 2 jam. Di Kota Sawahlunto, pajak daerah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak, yaitu ; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI HASIL PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH OLEH DPPKAD (DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH) KOTA SAWAHLUNTO “**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada pokok pikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, yaitu bahwa pajak daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Apakah pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir yang dilakukan oleh DPPKA Kota Sawahlunto selama ini telah efektif?
2. Apakah pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir yang dilakukan oleh DPPKA Kota Sawahlunto selama ini telah efisien?



3. Apakah alternatif yang mungkin dapat dipilih oleh Pemerintah Kota Sawahlunto terkait dengan pengelolaan pemungutan Pajak Daerah?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini terbatas pada sebesar apa efektivitas dan efisiensi hasil pemungutan pajak daerah oleh DPPKA Kota Sawahlunto dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Penelitian ini hanya membahas tentang analisis efektivitas dan efisiensi hasil pemungutan pajak daerah oleh DPPKA Kota Sawahlunto dan untuk perhitungan tingkat efektivitas tidak membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi penerimaan pajak. Tetapi hanya membandingkan dengan target penerimaan pajak.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah disampaikan pada perumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir selama lima tahun terakhir di Kota Sawahlunto.
2. Mengetahui tingkat efisiensi pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir selama lima tahun terakhir di Kota Sawahlunto.
3. Menentukan alternatif yang mungkin dapat dipilih oleh Pemerintah Kota Sawahlunto terkait dengan pengelolaan pemungutan Pajak Daerah.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak yang perkepentingan :

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana, dan menambah pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca, khususnya mengenai analisis tingkat efektivitas dan efisiensi hasil pemungutan pajak daerah.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan kebijakan tentang perpajakan khususnya dan pendapatan daerah umumnya pada masa yang akan datang.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya kewajiban untuk membayar pajak daerah demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

## 1. Bab I

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## 2. Bab II

Bab ini landasan teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Meliputi teori dan uraian tentang sumber pendapatan daerah, pajak, macam – macam pajak, pajak daerah; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir dan cara mengukur potensi pajak.

## 3. Bab III

Bab ini merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data – data yang digunakan beserta sumber data.

## 4. Bab IV

Bab ini merupakan uraian mengenai deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

## 5. Bab V

Bab ini merupakan penutup, dimana pada bab lima ini diuraikan kesimpulan dari hasil analisis data dan saran-saran yang ditujukan kepada instansi pemerintah Kota Sawahlunto terkait dengan pendapatan asli daerah.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Menyingkapi dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang setiap tahun meningkat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung percepatan pelaksanaan dan perwujudan otonomi daerah khususnya dibidang pendapatan daerah. Oleh karenanya kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah akan dapat diukur berdasarkan penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun dan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang menganut prinsip (1) Potensial artinya lebih menitik beratkan pada potensinya dari pada jumlah atau jenis pungutan yang banyak, (2) Tidak memberatkan masyarakat, (3) Tidak merusak lingkungan (4) Mudah diterapkan/diaplikasikan, mudah dilaksanakan, (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarip dan materinya.

Pendapatan daerah merupakan pos penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan juga merupakan tolok ukur berhasilnya suatu perusahaan atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pendapatan daerah yang berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam

periode tertentu menjadi hak daerah, setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing dengan mengidentifikasi sektor-sektor potensial untuk menggerakkan pembangunan daerah, terutama melalui potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala potensi yang ada pada daerah tersebut dan sifatnya dapat dipaksakan karena adanya peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.1 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- (1) hasil pajak daerah,
- (2) hasil retribusi daerah,
- (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- (4) lain-lain PAD yang sah.

### **2.1.2 Hasil Pajak daerah**

Hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan tersebut digunakan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

### **2.1.3 Hasil Retribusi Daerah**

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 64 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.



#### **2.1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan. Sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

#### **2.1.5 Lain-lain PAD yang sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### **2.2 Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

### **2.2.1 Jenis Pajak**

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah

Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dalam hal ini segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah, adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Pajak Penghasilan.

Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota, dimana untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau Unit Pelayanan Teknis Daerah yang dibawahhi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi, meliputi:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan;
  - e. Pajak Rokok.



## 2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

### 2.2.2 Wajib Pajak

Siapa yang digolongkan sebagai Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 2.2.3 Manfaat Pajak

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan

sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

### 2.3 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”. Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan tidak boleh bertentangan dengan pajak Pemerintah Pusat serta tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Pajak daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah,
- (2) Penyerahannya berdasarkan Undang-Undang,
- (3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang dan peraturan hukum, dan
- (4) Hasil pungutan pajak daerah di pergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Didalam segi kewenangan pemungutan pajak atas objek di daerah, dibagi atas dua hal yaitu:

- (1) Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, dan
- (2) Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota.



### **2.3.1. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, maka pajak daerah dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu :

- a. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Propinsi, terdiri dari :
  - 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
  - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
  - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
  - 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk perluasan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
- b. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
  - 1) Pajak Hotel

Adalah pajak atas pelayanan Hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang – orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lain dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2) Pajak Restoran

Adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering.

3) Pajak Hiburan

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

4) Pajak Reklame

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum.

5) Pajak Penerangan Jalan

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6) Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

7) Pajak Parkir

Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalab yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan yang memungut bayaran.

### **2.3.2 Penjelasan Pajak**

#### **1. Pajak Hotel**

##### **Pasal 3**

(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.



(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### **Pasal 4**

- a. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- b. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

#### **Pasal 5**

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

#### **Pasal 6**

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

### **Pasal 7**

(1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di Daerah.

## **2. Pajak Restoran**

### **Pasal 8**

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan melakukan pembayaran;

(2) Pelayanan yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

### **Pasal 9**

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran;

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

### **Pasal 10**

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

### **Pasal 11**

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## **Pasal 12**

(1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di Daerah.

### **3. Pajak Hiburan**

## **Pasal 13**

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, golf dan bowling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
- j. pertandingan olahraga; dan
- k. permainan / hiburan lainnya yang memungut bayaran.

## **Pasal 14**

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.



(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

#### **Pasal 15**

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. (2) Jumlah uang yang harus diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma- cuma, undangan yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

#### **Pasal 16**

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- (2) Khusus untuk hiburan berupa panti pijat, karaoke, mandi uap/spa 35 % (tiga puluh lima persen), diskotik dan klab malam ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);
- (3) Khusus Hiburan Kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak hiburan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

#### **Pasal 17**

(1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di Daerah.

### **4. Pajak Reklame**

#### **Pasal 18**

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide;
- j. reklame peragaan; dan
- k. reklame pengecatan toko / dinding dan sejenisnya (branding).

(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah tanpa menggunakan label / merk produk; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan oleh orang, organisasi masyarakat dan organisasi sosial politik yang tidak bertujuan komersil.

## **Pasal 19**

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

## **Pasal 20**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



- (5) Cara perhitungan dan hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 21**

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

#### **Pasal 22**

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di Daerah.

### **5. Pajak Penerangan Jalan**

#### **Pasal 23**

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- dan

- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;

#### **Pasal 24**

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik .
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

#### **Pasal 25**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- b. dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan yang berlaku di Daerah.

#### **Pasal 26**

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### **Pasal 27**

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di Daerah.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

### **6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

#### **Pasal 28**

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. Ddolomite;



- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit / andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;

gg. yarosif;

hh. zeolit;

ii. basal;

jj. traktit; dan

kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

#### **Pasal 29**

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### **Pasal 30**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### **Pasal 31**

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 2% (dua persen).

#### **Pasal 32**

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di daerah.



## **7. Pajak Parkir**

### **Pasal 33**

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik

### **Pasal 34**

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggara tempat Parkir.

### **Pasal 35**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir;
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

### **Pasal 36**

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## **Pasal 37**

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di Daerah.

## **2.4 Cara Mengukur Potensi Pajak**

### **2.4.1 Pengukuran Hasil Pemungutan**

Konsep pengukuran hasil pungutan yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan konsep *value for money* yang terdiri dari atas tiga elemen utama, yaitu:

- a. Ekonomi
- b. Efektivitas
- c. Efisiensi

Dari ketiga elemen utama tersebut, peneliti lebih menekankan pada dua elemen yaitu, efektivitas dan efisiensi.

### **2.4.2 Potensi Pajak dan Target Pajak**

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum dapat didapat atau diperoleh di tangan, untuk mendapatkan dan memperolehnya diperlukan upaya – upaya tertentu, misalnya upaya pajak (*tax effort*).

Potensi suatu penerimaan pajak dan retribusi secara umum dapat dihitung dengan mengalihkan tarif suatu pajak/retribusi dengan basis pajak/retribusi. Tarif pajak/retribusi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, seperti undang – undang tentang pajak dan retribusi daerah dan/atau peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Sementara itu, penentuan basis pajak

perlu dilakukan perhitungan secara objektif, sebab basis pajak atau retribusi ini akan mempengaruhi besarnya potensi pendapatan.

$$\text{Potensi Pendapatan Pajak} = \text{Basis Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Target Pendapatan Daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan di dalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor – faktor sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor – faktor yang menghambatnya.
- b. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun – tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan tahun berlaflu.
- c. Data potensi pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan.
- d. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dari dan penyempurnaan sistem pemungutan.
- e. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak.
- f. Perkembangan tersedianya saran dan prasarana serta biaya pungutan.

#### 2.4.3 Efektivitas

Efektivitas yaitu hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output* tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat



keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Devas, 1989)

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2003)

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely* (Mahmudi, 2007)

Rumus pengukuran efektivitas untuk pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target atau Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Dari pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*).

Tingkat efektivitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu :

- a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
- c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

#### 2.4.4 Efisiensi

Berkaitan dengan pajak, pengukuran efisiensi dilakukan dengan mengukur bagian dari hasil pajak yang akan digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak (Devas, 1989). Biaya yang dimaksud adalah jumlah dari biaya pendaftaran, pendataan, dan penetapan besarnya pajak terutang, serta biaya tagihan. Sedangkan realisasi yang dimaksud adalah pencapaian target yang telah dicapai. Efisiensi semakin besar jika biaya untuk memperoleh penerimaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak (Devas, 1989).

Rumus pengukuran efisiensi untuk pemungutan pajak adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{jumlah Biaya Administrasi Pajak}}{\text{Realisasi Pajak}} \times 100\%$$

Penerimaan pajak dapat dikatakan efisien apabila realisasi penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutan. Semakin kecil rasio maka semakin efisiensi yang dilakukan yaitu :

- a. Apabila hasilnya <20% berarti sangat efisien.
- b. Apabila hasilnya antara 20% sampai dengan 85% berarti efisien.
- c. Apabila hasilnya >85% berarti tidak efisien.

#### 2.5 Review Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan referensi dan sebagai acuan untuk penyusunan skripsi ini adalah :

1. Indra Riady (2010), dengan judul “Analisis Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut”. Hasil penelitiannya adalah selama lima tahun yaitu dari 2005-2009, hanya pada tahun 2007 realisasi penerimaan pajak penerangan melebihi potensi riil dari pajak penerangan jalan. Disamping itu,

efektifitas Pajak Penerangan Jalan belum efektif dan hanya pada tahun 2007 yang mencapai sangat efektif dengan koefisien tingkat efektivitas sebesar 101%. Selain itu, daya pajak menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak di Kabupaten Garut masih tergolong rendah dan perlu untuk di tingkatkan lagi.

2. M. Samsul Bahri F (2011), dengan judul “Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 – 2009”. Hasil penelitiannya adalah kondisi pemungutan pajak daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009 sudah efektif dan efisien rata – rata tingkat efisien 6,5%, tingkat efisiensi tertinggi pada tahun 2009 sebesar 2,6%, tingkat efisiensi terendah pada tahun 2004 dengan tingkat efisiensi 11,2%. Tingkat efektif tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 104,9% dan terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar 101,7%. Rata – rata tingkat efektivitas tahun anggaran 2004 – 2009 adalah 102,9%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Surakarta berhasil menggunakan bagian dari hasil pajak untuk digunakan menutup biaya pemungutan atas pajak yang bersangkutan dan mampu mencapai target pemungutan pajak daerah yang ditetapkan.
3. Syhintia Delina (2012), dengan judul “Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Solok”. Dengan hasil penelitian, menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemungutan pajak restoran di Kabupaten Solok dikategorikan efisien dari tahun 2008 – 2011. Dengan tingkat efisien yang terus



menurun dari tahun 2008 – 2010 yaitu berturut – turut 18.7% , 21.8% , 35.15% namun bisa kembali diangkat ke titik 24.2% pada tahun 2011. Sedangkan untuk tingkat efektivitas, tingkat efektivitas pemungutan Pajak Restoran tidak menunjukkan *progress* dalam artian berjalan fluktuatif dari tahun ke tahun walaupun rata – rata tingkat efektifitasnya dari tahun 2008 – 2011 dikategorikan efektif.

4. Riyant Lisano (2012), dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Hasil Pemungutan Pajak Daerah oleh DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kota Payakumbuh Sumatera Barat”. Dengan hasil penelitian analisis memperlihatkan bahwa, tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah oleh DPPKA Kota Payakumbuh rata – rata melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan relative mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk tingkat efisiensi, disimpulkan secara rata – rata efisiensi di kategorikan pada kelompok efisien selama pemungutan pajak dari tahun 2007-2011.
5. Elfayang Rizky Ayu Puspitasari (2014), dengan judul “Analisis Efektivitas, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bora Tahun 2009 – 2013”. Hasil dari penelitiannya adalah tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2009 – 2013 masuk dalam kategori sangat efektif. Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dari tahun 2009 – 2013 secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

Kabupaten Blora dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 kurang berkontribusi. Namun tingkat rasio kontribusinya cenderung naik. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009-2013 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya. Analisis uji beda t-tes untuk efektivitas dan efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah tidak menunjukkan perbedaan. Sedangkan untuk kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan perbedaan diantara keduanya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek / Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DDPKAD) Kota Sawahlunto. Sedangkan untuk objek analisis, penulis memilih untuk menganalisis hasil pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir di Kota Sawahlunto.

Penulis mengambil objek tersebut dengan alasan terdapat kemungkinan ketidak optimalan dalam potensi pajaknya, karena dibalik peningkatan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir pertumbuhannya tidak maksimal.

Pemilihan objek penelitian dilakukan secara sengaja. Hal yang menjadi pertimbangan lain pemilihan lokasi ini adalah ketersediaan data untuk dijadikan bahan penelitian.

#### **3.2 Jenis Dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang diperoleh dari buku – buku, artikel, Undang – undang dan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku jenis data yang digunakan meliputi :



- a. Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kota Sawahlunto untuk lima tahun terakhir (2009 – 2013) yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKKAD) Kota Sawahlunto.
- b. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir selama lima tahun terakhir (2009 – 2013) yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Sawahlunto.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan data – data lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah meliputi data target dan realisasi Pajak Daerah di Kota Sawahlunto, adapun data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Sawahlunto.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisa data. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian Deskriptif Persentase, yaitu untuk mengetahui persentase dengan menjelaskan variabel melalui pengukuran obyektif dan analisis numerikal (Mardalis, 2003:83).

Kemudian dilakukan analisis perhitungan tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir di Kota Sawahlunto. Pengukuran Efisiensi yang dilakukan dengan mengukur bagian dari hasil pajak yang akan digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak.

Biaya yang dimaksud adalah jumlah dari biaya Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan besarnya Pajak Terutang, serta biaya Penagihan. Sedangkan realisasi yang dimaksud adalah pencapaian target yang telah dicapai. Efisiensi lebih besar jika biaya untuk memperoleh penerimaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak. Rumus pengukuran efisiensi adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Jumlah Biaya Administrasi Pajak}}{\text{Realisasi Pajak}} \times 100\%$$

Penerimaan Pajak dapat dikatakan efisien apabila realisasi penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutan. Dari metode Nick Devas, maka kriteria pengukuran efisiensi yang dilakukan yaitu :

- a. Apabila hasilnya <20% berarti sangat efisien.
- b. Apabila hasilnya antara 20% sampai dengan 85% berarti efisien.
- c. Apabila hasilnya >85% berarti tidak efisien.

Sedangkan efektivitas diartikan sebagai sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2003).

Rumus pengukuran efektifitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target atau Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Untuk tingkat efektivitas, Nick Devas menggolongkan menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu :

- a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
- c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### 4.1 Gambaran Umum Kota Sawahlunto

##### 4.1.1 Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional tersebut diatas, serta mengakomodir visi, misi, kepala Daerah terpilih, maka visi Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2013 – 2018 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintah yang Melayani”**.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, diperlukan Misi Pembangunan Daerah yang telah disusun untuk periode 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan peluang usaha melalui keunggulan pariwisata dan produk lokal.
- b. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.
- c. Memupuk kehidupan sosial yang agamis dan berakhlak mulia serta mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan berkarakter.
- d. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat, sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- e. Menciptakan tata kelola pemerintah daerah yang bersih, melayani, kreatif, inovatif dan efisien.
- f. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah.

- g. Memperluas jaringan sosial, ekonomi secara nasional dan internasional.

#### **4.1.2 Kondisi Geografis Daerah**

Secara geografis Kota Sawahlunto berada pada  $0.34^{\circ} - 0.46^{\circ}$  LS dan  $100.41^{\circ} - 100.49^{\circ}$ BT, berbatas sebelah utara dengan Kabupaten Tanah Datar, sebelah Timur dengan Kabupaten Sawahluto/Sijunjung dan sebelah Selatan dan Barat dengan Kabupaten Solok.

#### **4.1.3 Kondisi Topografi Daerah**

Bentang alam Kota Sawahlunto terbentuk oleh perbukitan terjal, landai dan pendataran dengan elevasi 250 – 260 m diatas permukaan laut. Perbukitan terjal merupakan bentang alam yang terjal menjadi faktor pembatas dalam pengembangan wilayah kota, sedang pusat kota lama Sawahlunto terletak pada bentang alam landai sempit dan memanjang dengan luas 5,8 km<sup>2</sup>. Pendataran yang relatif lebar terdapat diwilayah Kecamatan Talawi, wilayah ini terbentang dari Utara ke Selatan, bagian Timur dan Selatan mempunyai topografi yang relatif curam (kemiringan lebih dari 40%), sedangkan di bagian utara bergelombang yang relatif datar. Luas wilayah Kota Sawahlunto paling banyak terletak pada ketinggian 100-500m. secara garis besar Kota Sawahlunto terdiri dari Kawasan Lindung (26,5%) dan kawasan Budidaya (73,5). Penggunaan tanah yang dominan merupakan perkebunan campuran (34,1%) hutan lebat dan befukar (19,5%). Sedangkan danau (0,2%) danau ini merupakan bekas galian penambangan batu bara.

#### **4.1.4 Iklim**

Seperti daerah lainnya di Propinsi Sumatera Barat, Kota Sawahlunto mempunyai iklim tropis dengan suhu berkisar antara  $22^{\circ}$  -  $33^{\circ}$  C. Sepanjang tahun terdapat dua musim yaitu musim hujan pada bulan November sampai Juni dan musim kemarau pada bulan Juli sampai bulan Oktober. Curah hujan rata-rata lebih kurang sebesar 1.071,6 milimeter per tahun dan curah hujan rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Desember.

#### **4.1.5 Penggunaan Lahan**

Karena wilayah topografi Kota yang berbukit dan relative curam, maka pemanfaatan lahan yang ada cukup beragam dan bercampur anatar meliputi daerah yang terbangun yang digunakan untuk berbagai kegiatan perumahan/permukiman dan daerah tidak terbangun seperti lahan pertanian, perkebunan dan sebagainya. Penggunaan lahan yang dominan adalah digunakan untuk kawasan hutan dan yang paling terkecil untuk tambak / kolam.

#### **4.1.6 Penduduk**

Jumlah penduduk Kota Sawahlunto akhir tahun 2008 adalah sebanyak 54.913 jiwa terdiri dari 27.045 jiwa pria dan 27.868 jiwa wanita, dengan kepadatan penduduk 200,82 jiwa/km<sup>2</sup>. Mata pencarian penduduk sangat beraneka ragam seperti bekerja di bidang pertanian, sector pertambangan dan bidang jasa. Struktur ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto sebagian besar ditopang oleh sector pertambangan. Subsector pertanian tanaman pangan, industri kecil/kerajinan rumah tangga dan sector peternakan. Dengan adanya perluasan wilayah berdasarkan



peraturan pemerintah No.44 tahun 1990, Kota Sawahlunto tidak hanya dikenal sebagai daerah sentral industri kerajinan, makanan kecil, peternakan, buah-buahan dan merupakan salah satu daerah tujuan wisata.

#### **4.1.7 Perekonomian Daerah**

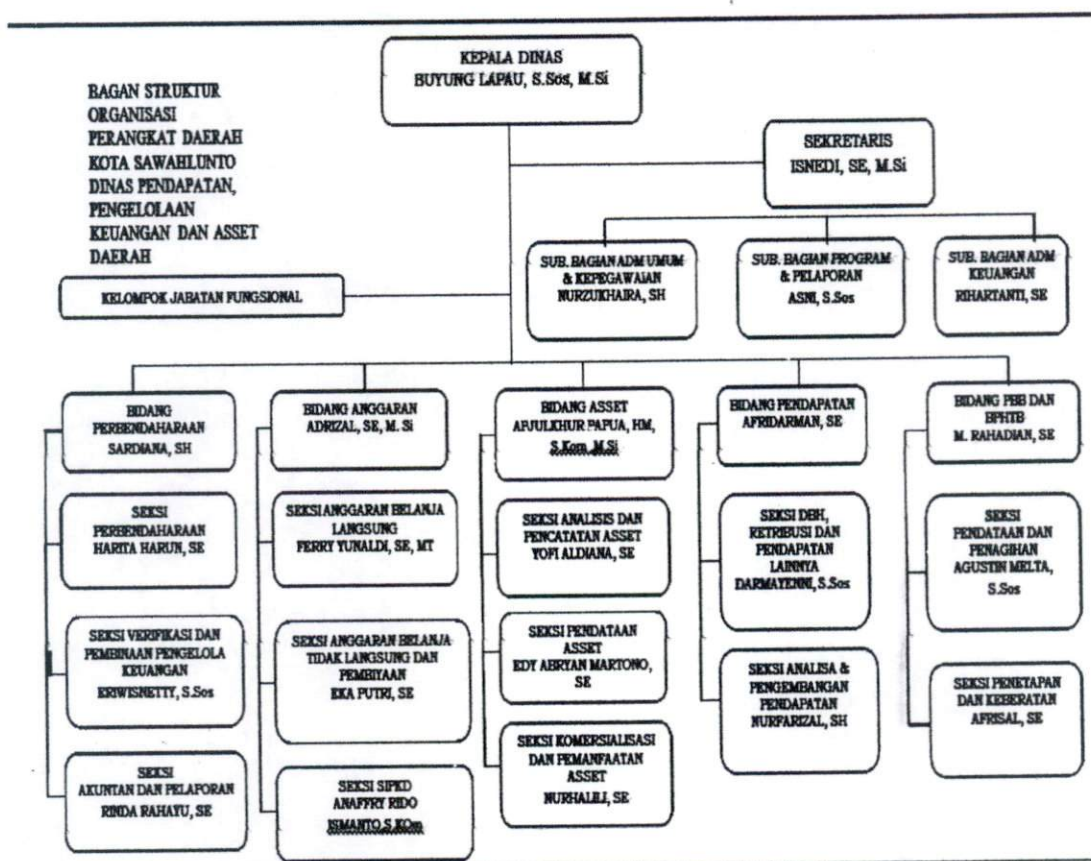
Pembangunan ekonomi daerah yang tangguh dan berkeadilan merupakan agenda Pembangunan Pemerintah Daerah sebagai komitmen dalam memajukan perekonomian Kota Sawahlunto yang difokuskan kepada pengembangan Industri wisata, revitalisasi pertanian, pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan kelembagaan ekonomi dan peningkatan investasi.

#### **4.1.8 Pertumbuhan Ekonomi**

Pada dasarnya membandingkan tingkat perekonomian pada suatu tahun dengan tahun sebelumnya sebagai akibat dari peningkatan produksi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. PDRB Kota Sawahlunto atas dasar harga konstan tahun 2009 meningkat 3.68% dibanding tahun 2008. Pertumbuhan signifikan pada sektor pertanian 8.06%, perdagangan, hotel dan restaurant 5.50% dan sektor bangunan 5.30%.

## 4.2 Struktur Organisasi DPPKAD

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH



KETERANGAN :

———— = GARIS KOMANDO

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013 NOMOR 5

### 4.3 Analisis Efektivitas dan Efisiensi

#### 4.3.1 Analisis Efektivitas

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Pajak}{Target atau Potensi Penerimaan Pajak} \times 100\%$$

- Tahun 2009

**Tabel 4.1**

**Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2009**

| No | Jenis Pajak                                | Target          | Realisasi         |
|----|--|-----------------|-------------------|
| 1  | Pajak Hotel                                | Rp. 28.000.000  | Rp. 30.067.925    |
| 2  | Pajak Restoran                             | Rp. 319.200.000 | Rp. 443.512.934   |
| 3  | Pajak Hiburan                              | Rp. 14.500.000  | Rp. 7.645.000     |
| 4  | Pajak Reklame                              | Rp. 35.000.000  | Rp. 31.145.481    |
| 5  | Pajak Penerangan Jalan                     | Rp. 972.500.000 | Rp. 1.058.541.595 |
| 6  | Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Gol. C | Rp. 40.000.000  | Rp. 24.395.975    |
| 7  | Pajak Parkir                               | Rp. 500.000     | Rp. 237.700       |

Sumber data : DPPKAD Kota Sawahlunto

#### a. Pajak Hotel

$$efektivitas = \frac{Rp. 30.067.925}{Rp. 28.000.000} \times 100\% = 107,39\%$$

#### b. Pajak Restoran

$$efektivitas = \frac{Rp. 443.512.934}{Rp. 319.200.000} \times 100\% = 138,95\%$$



**c. Pajak Hiburan**

$$efektivitas = \frac{Rp. 7.645.000}{Rp. 14.500.000} \times 100\% = 52,72\%$$

**d. Pajak Reklame**

$$efektivitas = \frac{Rp. 31.145.481}{Rp. 35.000.000} \times 100\% = 88,99\%$$

**e. Pajak Penerangan Jalan**

$$efektivitas = \frac{Rp. 1.058.541.595}{Rp. 972.500.000} \times 100\% = 108,85\%$$

**f. Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Gol. C**

$$efektivitas = \frac{Rp. 24.395.975}{Rp. 40.000.000} \times 100\% = 60,99\%$$

**g. Pajak Parkir**

$$efektivitas = \frac{Rp. 237.700}{Rp. 500.000} \times 100\% = 47,54\%$$

**Tabel 4.2**

**Tingkat Pencapaian Efektivitas Tahun 2009**

| No | Jenis Pajak    | Tingkat Pencapaian | Keterangan     |
|----|----------------|--------------------|----------------|
| 1  | Pajak Hotel    | 107,39%            | Sangat Efektif |
| 2  | Pajak Restoran | 138,95%            | Sangat Efektif |
| 3  | Pajak Hiburan  | 52,72%             | Tidak Efektif  |
| 4  | Pajak Reklame  | 88,99%             | Tidak Efektif  |

|   |  |         |                |
|---|--|---------|----------------|
| 5 | Pajak Penerangan Jalan                     | 108,85% | Sangat Efektif |
| 6 | Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Gol. C | 60,99%  | Tidak Efektif  |
| 7 | Pajak Parkir                               | 47,54%  | Tidak Efektif  |

Pada tahun 2009, Pajak daerah Kota Sawahlunto yang sangat efektif yaitu Pajak Hotel 107,39%, Pajak Restoran 138,95% dan Pajak Penerangan Jalan 108,85%. Sedangkan Pajak Daerah lainnya tidak efektif. Karena bisa kita lihat dari tingkat pencapaiannya dibawah 100%.

- Tahun 2010

**Tabel 4.3**

**Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2010**

| No | Jenis Pajak                                | Target            | Realisasi         |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 1  | Pajak Hotel                                | Rp. 38.000.000    | Rp. 33.195.768    |
| 2  | Pajak Restoran                             | Rp. 371.850.000   | Rp. 457.767.176   |
| 3  | Pajak Hiburan                              | Rp. 517.000.000   | Rp. 200.760.450   |
| 4  | Pajak Reklame                              | Rp. 42.000.000    | Rp. 29.866.489    |
| 5  | Pajak Penerangan Jalan                     | Rp. 1.055.000.000 | Rp. 1.190.329.195 |
| 6  | Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Gol. C | Rp. 75.000.000    | Rp. 16.834.255    |
| 7  | Pajak Parkir                               | Rp. 2.000.000     | Rp. 3.948.500     |

*Sumber data : DPPKAD Kota Sawahlunto*

**a. Pajak Hotel**

$$efektivitas = \frac{\text{Rp. 33.195.768}}{\text{Rp. 38.000.000}} \times 100\% = 87,36\%$$

**b. Pajak Restoran**

$$efektivitas = \frac{\text{Rp. 457.767.176}}{\text{Rp. 371.850.000}} \times 100\% = 123,11\%$$

**c. Pajak Hiburan**

$$efektivitas = \frac{\text{Rp. 200.760.450}}{\text{Rp. 517.000.000}} \times 100\% = 38,83\%$$

**d. Pajak Reklame**

$$efektivitas = \frac{\text{Rp. 29.866.489}}{\text{Rp. 42.000.000}} \times 100\% = 71,11\%$$

**e. Pajak Penerangan Jalan**

$$efektivitas = \frac{\text{Rp. 1.190.329.195}}{\text{Rp. 1.055.000.000}} \times 100\% = 112,83\%$$

**f. Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Gol. C**

$$efektivitas = \frac{\text{Rp. 16.834.255}}{\text{Rp. 75.000.000}} \times 100\% = 22,45\%$$

**g. Pajak Parkir**

$$efektivitas = \frac{\text{Rp. 3.948.500}}{\text{Rp. 2.000.000}} \times 100\% = 197,43\%$$



**Tabel 4.4**

**Tingkat Pencapaian Efektivitas Tahun 2010**

| No | Jenis Pajak                                | Tingkat Pencapaian | Keterangan     |
|----|--|--------------------|----------------|
| 1  | Pajak Hotel                                | 87,36%             | Tidak Efektif  |
| 2  | Pajak Restoran                             | 123,11%            | Sangat Efektif |
| 3  | Pajak Hiburan                              | 38,83%             | Tidak Efektif  |
| 4  | Pajak Reklame                              | 71,11%             | Tidak Efektif  |
| 5  | Pajak Penerangan Jalan                     | 112,83%            | Sangat Efektif |
| 6  | Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Gol. C | 22,45%             | Tidak Efektif  |
| 7  | Pajak Parkir                               | 197,43%            | Sangat Efektif |

Pada tahun 2010, Pajak Hotel mengalami penurunan pencapaian tingkat efektivitas yaitu dari 107,39% menjadi 87,36%. Tingkat pencapaiannya pada tahun ini tidak efektif. Dan Pajak Parkir mengalami kenaikan yang signifikan dari tidak efektif menjadi sangat efektif yaitu dari 47,54% naik menjadi 197,43%.

- Tahun 2011

**Tabel 4.5**

**Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2011**

| No | Jenis Pajak    | Target          | Realisasi       |
|----|----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Pajak Hotel    | Rp. 60.000.000  | Rp. 27.700.167  |
| 2  | Pajak Restoran | Rp. 423.600.000 | Rp. 565.254.594 |
| 3  | Pajak Hiburan  | Rp. 267.000.000 | Rp. 249.466.600 |

|   |  |                   |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 4 | Pajak Reklame                              | Rp. 42.000.000    | Rp. 40.284.352    |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan                     | Rp. 1.160.000.000 | Rp. 1.371.716.755 |
| 6 | Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Gol. C | Rp. 85.000.000    | Rp. 42.810.120    |
| 7 | Pajak Parkir                               | Rp. 2.000.000     | Rp. 1.661.400     |

Sumber data : DPPKAD Kota Sawahlunto

**a. Pajak Hotel**

$$efektivitas = \frac{Rp. 27.700.167}{Rp. 60.000.000} \times 100\% = 46,17\%$$

**b. Pajak Restoran**

$$efektivitas = \frac{Rp. 565.254.594}{Rp. 423.600.000} \times 100\% = 133,44\%$$

**c. Pajak Hiburan**

$$efektivitas = \frac{Rp. 249.466.600}{Rp. 267.000.000} \times 100\% = 93,43\%$$

**d. Pajak Reklame**

$$efektivitas = \frac{Rp. 40.284.352}{Rp. 42.000.000} \times 100\% = 95,92\%$$

**e. Pajak Penerangan Jalan**

$$efektivitas = \frac{Rp. 1.371.716.755}{Rp. 1.160.000.000} \times 100\% = 118,25\%$$

**f. Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Gol. C**

$$efektivitas = \frac{Rp.42.810.120}{Rp.85.000.000} \times 100\% = 50,36\%$$

**g. Pajak Parkir**

$$efektivitas = \frac{Rp.1.661.400}{Rp.2.000.000} \times 100\% = 83,07\%$$

**Tabel 4.6**

**Tingkat Pencapaian Efektivitas Tahun 2011**

| No | Jenis Pajak                                | Tingkat Pencapaian | Keterangan     |
|----|--|--------------------|----------------|
| 1  | Pajak Hotel                                | 46,17%             | Tidak Efektif  |
| 2  | Pajak Restoran                             | 133,44%            | Sangat Efektif |
| 3  | Pajak Hiburan                              | 93,43%             | Tidak Efektif  |
| 4  | Pajak Reklame                              | 95,92%             | Tidak Efektif  |
| 5  | Pajak Penerangan Jalan                     | 118,25%            | Sangat Efektif |
| 6  | Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Gol. C | 50,36%             | Tidak Efektif  |
| 7  | Pajak Parkir                               | 83,07%             | Tidak Efektif  |

Di tahun 2011, tingkat pencapaian Pajak Parkir mengalami penurunan kembali dari sangat efektif menjadi tidak efektif yaitu dari 197,43% turun menjadi 83,07%. Dan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C masih tidak efektif.

- Tahun 2012

**Tabel 4.7**

**Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2012**

| No | Jenis Pajak                                | Target            | Realisasi         |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 1  | Pajak Hotel                                | Rp. 75.000.000    | Rp. 89.961.390    |
| 2  | Pajak Restoran                             | Rp. 450.950.000   | Rp. 580.219.684   |
| 3  | Pajak Hiburan                              | Rp. 492.000.000   | Rp. 484.108.100   |
| 4  | Pajak Reklame                              | Rp. 48.000.000    | Rp. 41.303.357    |
| 5  | Pajak Penerangan Jalan                     | Rp. 1.185.000.000 | Rp. 1.475.439.589 |
| 6  | Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Gol. C | Rp. 50.000.000    | Rp. 8.084.734     |
| 7  | Pajak Parkir                               | Rp. 5.000.000     | Rp. 2.610.160     |

*Sumber data : DPPKAD Kota Sawahlunto*

**a. Pajak Hotel**

$$efektivitas = \frac{Rp.89.961.390}{Rp.75.000.000} \times 100\% = 119,95\%$$

**b. Pajak Restoran**

$$efektivitas = \frac{Rp.580.219.684}{Rp.450.950.000} \times 100\% = 128,67\%$$

**c. Pajak Hiburan**

$$efektivitas = \frac{Rp.484.108.100}{Rp.492.000.000} \times 100\% = 98,40\%$$



**d. Pajak Reklame**

$$efektivitas = \frac{Rp.41.303.357}{Rp.48.000.000} \times 100\% = 86,05\%$$

**e. Pajak Penerangan Jalan**

$$efektivitas = \frac{Rp.1.475.439.589}{Rp.1.185.000.000} \times 100\% = 124,51\%$$

**f. Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Gol. C**

$$efektivitas = \frac{Rp.8.084.734}{Rp.50.000.000} \times 100\% = 16,17\%$$

**g. Pajak Parkir**

$$efektivitas = \frac{Rp.2.610.160}{Rp.5.000.000} \times 100\% = 52,20\%$$

**Tabel 4.8**

**Tingkat Pencapaian Efektivitas Tahun 2012**

| No | Jenis Pajak                                | Tingkat Pencapaian | Keterangan     |
|----|--|--------------------|----------------|
| 1  | Pajak Hotel                                | 119,95%            | Sangat Efektif |
| 2  | Pajak Restoran                             | 128,67%            | Sangat Efektif |
| 3  | Pajak Hiburan                              | 98,40%             | Tidak Efektif  |
| 4  | Pajak Reklame                              | 86,05%             | Tidak Efektif  |
| 5  | Pajak Penerangan Jalan                     | 124,51%            | Sangat Efektif |
| 6  | Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Gol. C | 16,17%             | Tidak Efektif  |
| 7  | Pajak Parkir                               | 52,20%             | Tidak Efektif  |

Tahun 2012, Pajak Hotel mencapai tingkat efektivitas yang sangat efektif dari 46,17% menjadi 119,95%. Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir masih tidak efektif.

- Tahun 2013

**Tabel 4.9**

**Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013**

| No | Jenis Pajak                                | Target            | Realisasi         |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 1  | Pajak Hotel                                | Rp. 100.000.000   | Rp. 174.944.052   |
| 2  | Pajak Restoran                             | Rp. 527.170.000   | Rp. 704.656.895   |
| 3  | Pajak Hiburan                              | Rp. 607.100.000   | Rp. 504.947.700   |
| 4  | Pajak Reklame                              | Rp. 42.000.000    | Rp. 51.732.687    |
| 5  | Pajak Penerangan Jalan                     | Rp. 1.500.000.000 | Rp. 1.653.631.722 |
| 6  | Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Gol. C | Rp. 8.000.000     | Rp. 0             |
| 7  | Pajak Parkir                               | Rp. 3.000.000     | Rp. 6.732.900     |

*Sumber data : DPPKAD Kota Sawahlunto*

**a. Pajak Hotel**

$$efektivitas = \frac{Rp.174.944.052}{Rp.100.000.000} \times 100\% = 174,94\%$$

**b. Pajak Restoran**

$$efektivitas = \frac{Rp.704.656.895}{Rp.527.170.000} \times 100\% = 133,67\%$$

**c. Pajak Hiburan**

$$efektivitas = \frac{Rp.504.947.700}{Rp.607.100.000} \times 100\% = 83,92\%$$

**d. Pajak Reklame**

$$efektivitas = \frac{Rp.51.732.687}{Rp.42.000.000} \times 100\% = 123,17\%$$

**e. Pajak Penerangan Jalan**

$$efektivitas = \frac{Rp.1.653.631.722}{Rp.1.500.000.000} \times 100\% = 110,24\%$$

**f. Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Gol. C**

$$efektivitas = \frac{Rp.0}{Rp.8.000.000} \times 100\% = 0\%$$

**g. Pajak Parkir**

$$efektivitas = \frac{Rp.6.732.900}{Rp.3.000.000} \times 100\% = 224,43\%$$

**Tabel 4.10**

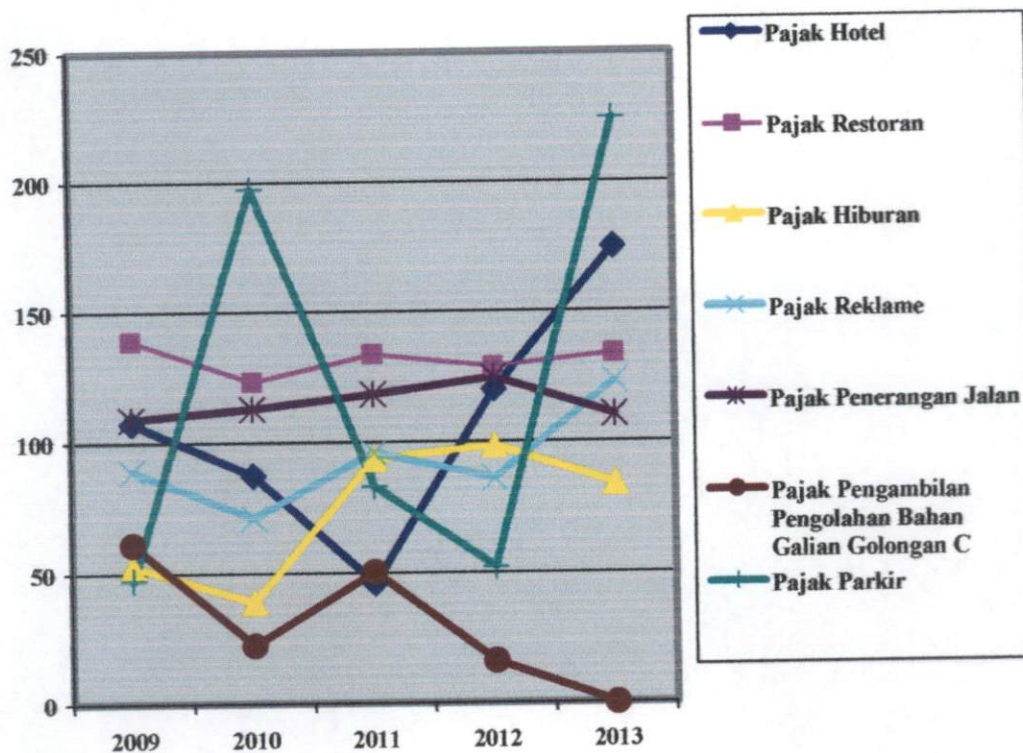
**Tingkat Pencapaian Efektivitas Tahun 2009**

| No | Jenis Pajak    | Tingkat Pencapaian | Keterangan     |
|----|----------------|--------------------|----------------|
| 1  | Pajak Hotel    | 174,94%            | Sangat Efektif |
| 2  | Pajak Restoran | 133,67%            | Sangat Efektif |
| 3  | Pajak Hiburan  | 83,92%             | Tidak Efektif  |
| 4  | Pajak Reklame  | 123,17%            | Sangat Efektif |



|   |  |         |                |
|---|--|---------|----------------|
| 5 | Pajak Penerangan Jalan                     | 110,24% | Sangat Efektif |
| 6 | Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Gol. C | 0%      | Tidak Efektif  |
| 7 | Pajak Parkir                               | 224,43% | Sangat Efektif |

Di tahun 2013, Pajak Parkir mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tidak efektif menjadi sangat efektif, yaitu dari 52,20% menjadi 224,43%. Begitu juga dengan Pajak Reklame yang pada tahun 2013 juga mencapai tingkat efektivitas yang sangat efektif yaitu 123,17%. Bias kita lihat dari tahun 2009 sampai tahun 2013, Pajak Reklame baru mencapai tingkat efektivitas yang sangat efektif pada tahun 2013 ini. Di tahun - tahun sebelumnya tingkat pencapaian Pajak Reklame masih dibawah 100%. Pajak Hiburan dan Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C masih belum mencapai tingkat pencapaian 100% dan diatas 100%, ini artinya kedua pajak tersebut tidak efektif dari tahun 2009 sampai tahun 2013.



**Grafik Tingkat Pencapaian Analisis Efektivitas**

Dari hasil analisis efektivitas diatas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2009 sampai tahun 2013 hanya Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan yang selalu mencapai tingkat efektivitas yang sangat efektif.

#### 4.3.2 Analisis Efisiensi

$$Efisiensi = \frac{\text{Jumlah Biaya Administrasi Pajak}}{\text{Realisasi Pajak}} \times 100\%$$

- Tahun 2009

**Tabel 4.11**

**Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2009**

| No | Jenis Biaya   | Jumlah          |
|----|---|-----------------|
| 1  | Biaya Pemungutan Pajak Daerah                             | Rp. 112.350.900 |
| 2  | Belanja Alat Tulis Kantor                                 | Rp. 81.900.500  |
| 3  | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja  | Rp. 92.005.000  |
| 4  | Belanja Cetak dan Penggandaan                             | Rp. 64.340.800  |
| 5  | Biaya Gaji Pemungut Pajak                                 | Rp. 5.948.300   |
| 6  | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah | Rp. 79.777.330  |

Sumber data : DPPKAD Kota Sawahlunto

**Tabel 4.12**

**Alokasi Biaya Tahun 2009**

| No               | Jenis Biaya | Jumlah Alokasi Per Jenis Pajak ( dalam rupiah) |                    |                  |                   |                      |  |                |
|------------------|-------------|--|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|--|----------------|
|                  |             | Hotel  | Restoran           | Hiburan          | Reklame           | Penerangan Jalan     | Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C | Parkir         |
| 1                | 1           | 2.112.197                                      | 31.233.550         | 539.284          | 2.190.843         | 74.533.587           | 1.718.969                                      | 22.470         |
| 2                | 2           | 1.539.729                                      | 22.768.339         | 393.122          | 1.597.060         | 54.332.792           | 1.253.078                                      | 16.380         |
| 3                | 3           | 1.729.694                                      | 25.577.390         | 441.624          | 1.794.098         | 61.036.117           | 1.407.677                                      | 18.401         |
| 4                | 4           | 1.209.607                                      | 17.886.742         | 308.836          | 1.254.646         | 42.683.687           | 984.414  | 12.868         |
| 5                | 5           | 111.828  | 1.653.627          | 28.552           | 115.992           | 3.946.102            | 91.009   | 1.190          |
| 6                | 6           | 1.499.814                                      | 22.178.098         | 382.931          | 1.555.658         | 52.924.281           | 1.220.593                                      | 15.955         |
| <b>Jumlah</b>    |             | <b>8.202.869</b>                               | <b>121.297.747</b> | <b>2.094.350</b> | <b>8.508.295</b>  | <b>289.456.565</b>   | <b>6.675.739</b>                               | <b>87.265</b>  |
| <b>Realisasi</b> |             | <b>30.067.925</b>                              | <b>443.512.934</b> | <b>7.645.000</b> | <b>31.145.481</b> | <b>1.058.541.595</b> | <b>24.395.975</b>                              | <b>237.700</b> |

**a. Pajak Hotel**

$$efisiensi = \frac{Rp\ 8.202.869}{Rp\ 30.067.925} \times 100\% = 27,28\%$$

**b. Pajak Restoran**

$$efisiensi = \frac{Rp\ 121.297.747}{Rp\ 443.512.934} \times 100\% = 27,35\%$$

**c. Pajak Hiburan**

$$efisiensi = \frac{Rp\ 2.094.350}{Rp\ 7.645.000} \times 100\% = 27,40\%$$

**d. Pajak Reklame**

$$efisiensi = \frac{Rp\ 8.508.295}{Rp\ 31.145.481} \times 100\% = 27,32\%$$

**e. Pajak Penerangan Jalan**

$$efisiensi = \frac{Rp\ 289.456.565}{Rp\ 1.058.541.595} \times 100\% = 27,34\%$$

**f. Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Gol. C**

$$efisiensi = \frac{Rp\ 6.675.739}{Rp\ 24.395.975} \times 100\% = 27,36\%$$

**g. Pajak Parkir**

$$efisiensi = \frac{Rp\ 87.265}{Rp\ 237.700} \times 100\% = 36,71\%$$



Tingkat efisiensi semua Pajak Daerah pada tahun 2009 berada diantara 20% sampai 85%, yaitu Pajak Hotel 27,28%, Pajak Restoran 27,35%, Pajak Hiburan 27,40%, Pajak Reklame 27,32%, Pajak Penerangan Jalan 27,34%, Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 27,36% dan Pajak Parkir 36,71% ini artinya semua Pajak Daerah Kota Sawahlunto sudah efisien.

- Tahun 2010

**Tabel 4.13**

**Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2010**

| No | Jenis Biaya   | Jumlah          |
|----|---|-----------------|
| 1  | Biaya Pemungutan Pajak Daerah                             | Rp. 130.499.250 |
| 2  | Belanja Alat Tulis Kantor                                 | Rp. 90.210.300  |
| 3  | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja  | Rp. 100.540.600 |
| 4  | Belanja Cetak dan Penggandaan                             | Rp. 77.303.500  |
| 5  | Biaya Gaji Pemungut Pajak                                 | Rp. 27.777.300  |
| 6  | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah | Rp. 96.635.092  |

*Sumber data : DPPKAD Kota Sawahlunto*

**Tabel 4.14**

**Alokasi Biaya Tahun 2010**

| No | Jenis Biaya | Jumlah Alokasi Per Jenis Pajak ( dalam rupiah) |            |            |           |                  |  |         |
|----|-------------|--|------------|------------|-----------|------------------|--|---------|
|    |             | Hotel  | Restoran   | Hiburan    | Reklame   | Penerangan Jalan | Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C | Parkir  |
| 1  | 1           | 2.218.487                                      | 30.915.272 | 13.558.872 | 2.002.738 | 80.374.488       | 1.135.343                                      | 274.048 |

|           |   |            |             |             |            |               |            |           |
|-----------|---|------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 2         | 2 | 1.533.575  | 21.370.820  | 9.372.850   | 1.398.260  | 55.560.524    | 784.830    | 189.442   |
| 3         | 3 | 1.709.190  | 23.818.068  | 10.446.168  | 1.558.379  | 61.922.956    | 874.703    | 211.135   |
| 4         | 4 | 1.314.160  | 18.313.199  | 8.031.834   | 1.198.204  | 47.611.226    | 672.540    | 162.337   |
| 5         | 5 | 472.214    | 6.580.442   | 2.886.061   | 430.548    | 17.108.039    | 241.663    | 58.332    |
| 6         | 6 | 1.642.797  | 22.892.853  | 10.040.386  | 1.497.844  | 59.517.553    | 840.725    | 202.934   |
| Jumlah    |   | 8.890.423  | 123.890.655 | 54.336.172  | 8.105.974  | 322.094.785   | 4.549.805  | 1.098.229 |
| Realisasi |   | 33.195.768 | 457.767.176 | 200.760.450 | 29.866.489 | 1.190.329.195 | 16.834.255 | 3.948.500 |

**a. Pajak Hotel**

$$efisiensi = \frac{Rp. 8.890.423}{Rp. 33.195.768} \times 100\% = 26,78\%$$

**b. Pajak Restoran**

$$efisiensi = \frac{Rp. 123.890.655}{Rp. 457.767.176} \times 100\% = 27,06\%$$

**c. Pajak Hiburan**

$$efisiensi = \frac{Rp. 54.336.172}{Rp. 200.760.450} \times 100\% = 27,07\%$$

**d. Pajak Reklame**

$$efisiensi = \frac{Rp. 8.105.974}{Rp. 29.866.489} \times 100\% = 27,14\%$$

**e. Pajak Penerangan Jalan**

$$efisiensi = \frac{Rp. 322.094.785}{Rp. 1.190.329.195} \times 100\% = 27,06\%$$

**f. Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Gol. C**

$$efisiensi = \frac{Rp. 4.549.805}{Rp. 16.834.255} \times 100\% = 27,03\%$$

**g. Pajak Parkir**

$$efisiensi = \frac{Rp. 1.098.229,}{Rp. 16.834.255} \times 100\% = 27,81\%$$

Dari hasil pengolahan data pada tahun 2010, tingkat pencapaian efisiensi semua Pajak Daerah masih diantara 20% sampai 85%. Berarti penerimaan semua Pajak Daerah di Kota Sawahlunto sudah efisien.

- Tahun 2011

**Tabel 4.15**

**Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2011**

| No | Jenis Biaya   | Jumlah          |
|----|---|-----------------|
| 1  | Biaya Pemungutan Pajak Daerah                             | Rp. 126.098.400 |
| 2  | Belanja Alat Tulis Kantor                                 | Rp. 95.371.800  |
| 3  | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja  | Rp. 92.335.800  |
| 4  | Belanja Cetak dan Penggandaan                             | Rp. 81.269.450  |
| 5  | Biaya Gaji Pemungut Pajak                                 | Rp. 6.635.800   |
| 6  | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah | Rp. 116.007.314 |

*Sumber data : DPPKAD Kota Sawahlunto*

Tabel 4.16

## Alokasi Biaya Tahun 2011

| No        | Jenis Biaya | Jumlah Alokasi Per Jenis Pajak ( dalam rupiah) |             |             |            |                  |  |           |
|-----------|-------------|--|-------------|-------------|------------|------------------|--|-----------|
|           |             | Hotel  | Restoran    | Hiburan     | Reklame    | Penerangan Jalan | Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C | Parkir    |
| 1         | 1           | 1.513.181                                      | 31.020.206  | 13.681.676  | 2.206.722  | 75.154.646       | 2.345.430                                      | 176.538   |
| 2         | 2           | 1.144.462                                      | 23.461.463  | 10.347.840  | 1.669.007  | 56.841.593       | 1.773.915                                      | 133.521   |
| 3         | 3           | 1.108.030                                      | 22.714.607  | 10.018.434  | 1.615.877  | 55.032.137       | 1.717.446                                      | 129.270   |
| 4         | 4           | 975.233  | 19.992.285  | 8.817.735   | 1.422.215  | 48.436.592       | 1.511.612                                      | 113.777   |
| 5         | 5           | 79.630   | 1.632.407   | 719.984     | 116.127    | 3.954.937        | 123.426  | 9.290     |
| 6         | 6           | 1.392.088                                      | 28.537.799  | 12.586.794  | 2.030.128  | 69.140.359       | 2.157.736                                      | 162.410   |
| Jumlah    |             | 6.212.623                                      | 127.358.767 | 56.172.464  | 9.060.075  | 308.560.264      | 9.629.565                                      | 724.806   |
| Realisasi |             | 27.700.167                                     | 565.254.594 | 249.466.600 | 40.284.352 | 1.371.716.755    | 42.810.120                                     | 1.661.400 |

## a. Pajak Hotel

$$efisiensi = \frac{Rp. 6.212.623}{Rp. 27.700.167} \times 100\% = 22,43\%$$

## b. Pajak Restoran

$$efisiensi = \frac{Rp. 127.358.767}{Rp. 565.254.594} \times 100\% = 22,53\%$$

## c. Pajak Hiburan

$$efisiensi = \frac{Rp. 56.172.464}{Rp. 249.466.600} \times 100\% = 22,52\%$$



**d. Pajak Reklame**

$$efisiensi = \frac{Rp. 9.060.075}{Rp. 40.284.352} \times 100\% = 22,49\%$$

**e. Pajak Penerangan Jalan**

$$efisiensi = \frac{Rp. 308.560.264}{Rp. 1.371.716.755} \times 100\% = 22,49\%$$

**f. Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Gol. C**

$$efisiensi = \frac{Rp. 9.629.565}{Rp. 42.810.120} \times 100\% = 22,49\%$$

**g. Pajak Parkir**

$$efisiensi = \frac{Rp. 724.806}{Rp. 1.661.400} \times 100\% = 43,63\%$$

Ditahun ini penerimaan Pajak Daerah Kota Sawahlunto masih bias dikatakan efisien. Karena tingkat pencapaian efisiensi penerimaan pajak daerahnya masih diantara 20% sampai dengan 85%.

- Tahun 2012

**Tabel 4.17**

**Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2012**

| No | Jenis Biaya  | Jumlah          |
|----|--|-----------------|
| 1  | Biaya Pemungutan Pajak Daerah                            | Rp. 118.595.000 |
| 2  | Belanja Alat Tulis Kantor                                | Rp. 90.347.800  |
| 3  | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja | Rp. 99.036.500  |

|   |   |     |             |
|---|---|-----|-------------|
| 4 | Belanja Cetak dan Penggandaan                             | Rp. | 86.980.200  |
| 5 | Biaya Gaji Pemungut Pajak                                 | Rp. | 7.032.100   |
| 6 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah | Rp. | 148.496.023 |

Sumber data : DPPKAD Kota Sawahlunto

**Tabel 4.18**

**Alokasi Biaya Tahun 2012**

| No               | Jenis Biaya | Jumlah Alokasi Per Jenis Pajak ( dalam rupiah) |                    |                    |                   |                      |  |                  |
|------------------|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|------------------|
|                  |             | Hotel  | Restoran           | Hiburan            | Reklame           | Penerangan Jalan     | Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C | Parkir           |
| 1                | 1           | 3.972.933                                      | 25.663.958         | 21.406.398         | 1.826.363         | 62.250.969           | 355.785  | 118.595          |
| 2                | 2           | 3.026.651                                      | 19.551.264         | 16.307.778         | 1.391.356         | 49.709.360           | 271.043  | 90.348           |
| 3                | 3           | 3.317.723                                      | 21.431.499         | 17.876.088         | 1.525.162         | 54.489.882           | 297.110  | 99.037           |
| 4                | 4           | 2.913.837                                      | 18.822.515         | 15.699.926         | 1.339.495         | 47.856.506           | 260.941  | 86.980           |
| 5                | 5           | 235.575  | 1.521.746          | 1.269.294          | 108.294           | 3.869.061            | 21.096   | 7.032            |
| 6                | 6           | 4.974.617                                      | 32.134.539         | 26.803.532         | 2.286.839         | 81.702.512           | 445.488  | 148.496          |
| <b>Jumlah</b>    |             | <b>18.441.335</b>                              | <b>119.125.522</b> | <b>99.363.016</b>  | <b>8.477.509</b>  | <b>302.878.290</b>   | <b>1.651.463</b>                               | <b>550.488</b>   |
| <b>Realisasi</b> |             | <b>89.961.390</b>                              | <b>580.219.684</b> | <b>484.108.100</b> | <b>41.303.357</b> | <b>1.475.439.589</b> | <b>8.084.734</b>                               | <b>2.610.160</b> |

**a. Pajak Hotel**

$$efisiensi = \frac{Rp.18.441.335}{Rp.89.961.390} \times 100\% = 20,50\%$$

**b. Pajak Restoran**

$$efisiensi = \frac{Rp.119.125.522}{Rp.580.219.684} \times 100\% = 20,53\%$$

c. Pajak Hiburan

$$efisiensi = \frac{Rp. 99.363.016}{Rp. 484.108.100} \times 100\% = 20,52\%$$

d. Pajak Reklame

$$efisiensi = \frac{Rp. 8.477.509}{Rp. 41.303.357} \times 100\% = 20,52\%$$

e. Pajak Penerangan Jalan

$$efisiensi = \frac{Rp. 302.878.290}{Rp. 1.475.439.589} \times 100\% = 20,53\%$$

f. Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Gol. C

$$efisiensi = \frac{Rp. 1.651.463}{Rp. 8.084.734} \times 100\% = 20,43\%$$

g. Pajak Parkir

$$efisiensi = \frac{Rp. 550.488}{Rp. 2.610.160} \times 100\% = 21,09\%$$

Penerimaan pajak daerah Kota Sawahlunto pada tahun 2012 masih efisien.

Karena tingkat pencapaian efisiensinya masih berada diantara 20% sampai 85%.

- Tahun 2013

**Tabel 4.19**

**Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2013**

| No | Jenis Biaya   | Jumlah          |
|----|---|-----------------|
| 1  | Biaya Pemungutan Pajak Daerah                             | Rp. 132.889.600 |
| 2  | Belanja Alat Tulis Kantor                                 | Rp. 86.907.100  |
| 3  | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja  | Rp. 127.436.800 |
| 4  | Belanja Cetak dan Penggandaan                             | Rp. 95.624.300  |
| 5  | Biaya Gaji Pemungut Pajak                                 | Rp. 7.509.600   |
| 6  | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah | Rp. 159.275.409 |

*Sumber data : DPPKAD Kota Sawahlunto*

**Tabel 4.20**

**Alokasi Biaya Tahun 2013**

| No               | Jenis Biaya | Jumlah Alokasi Per Jenis Pajak ( dalam rupiah) |                    |                    |                   |                      |  |                  |
|------------------|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|------------------|
|                  |             | Hotel  | Restoran           | Hiburan            | Reklame           | Penerangan Jalan     | Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C | Parkir           |
| 1                | 1           | 7.508.262                                      | 30.245.673         | 21.661.005         | 2.219.256         | 70.963.046           | 0  | 292.357          |
| 2                | 2           | 4.910.251                                      | 19.780.056         | 14.165.857         | 1.451.349         | 46.408.391           | 0  | 191.196          |
| 3                | 3           | 7.200.179                                      | 29.004.616         | 20.772.198         | 2.128.195         | 68.051.251           | 0  | 280.361          |
| 4                | 4           | 5.402.773                                      | 21.764.091         | 15.586.761         | 1.596.926         | 51.063.376           | 0  | 210.373          |
| 5                | 5           | 424.292  | 1.709.185          | 1.224.065          | 125.410           | 4.010.126            | 0  | 16.521           |
| 6                | 6           | 159.275.409                                    | 36.251.083         | 25.961.892         | 2.659.899         | 85.053.069           | 0  | 350.406          |
| <b>Jumlah</b>    |             | <b>34.444.819</b>                              | <b>138.754.703</b> | <b>99.371.778</b>  | <b>10.181.035</b> | <b>325.549.260</b>   | <b>0</b>                                       | <b>1.341.214</b> |
| <b>Realisasi</b> |             | <b>174.944.052</b>                             | <b>704.656.895</b> | <b>504.947.700</b> | <b>51.732.687</b> | <b>1.653.631.722</b> | <b>0</b>                                       | <b>6.732.900</b> |



**a. Pajak Hotel**

$$efisiensi = \frac{Rp. 34.444.819}{Rp. 174.944.052} \times 100\% = 19,69\%$$

**b. Pajak Restoran**

$$efisiensi = \frac{Rp. 138.754.703}{Rp. 704.656.895} \times 100\% = 19,69\%$$

**c. Pajak Hiburan**

$$efisiensi = \frac{Rp. 99.371.778}{Rp. 504.947.700} \times 100\% = 19,68\%$$

**d. Pajak Reklame**

$$efisiensi = \frac{Rp. 10.181.035}{Rp. 51.732.687} \times 100\% = 19,68\%$$

**e. Pajak Penerangan Jalan**

$$efisiensi = \frac{Rp. 325.549.260}{Rp. 1.653.631.722} \times 100\% = 19,69\%$$

**f. Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Gol. C**

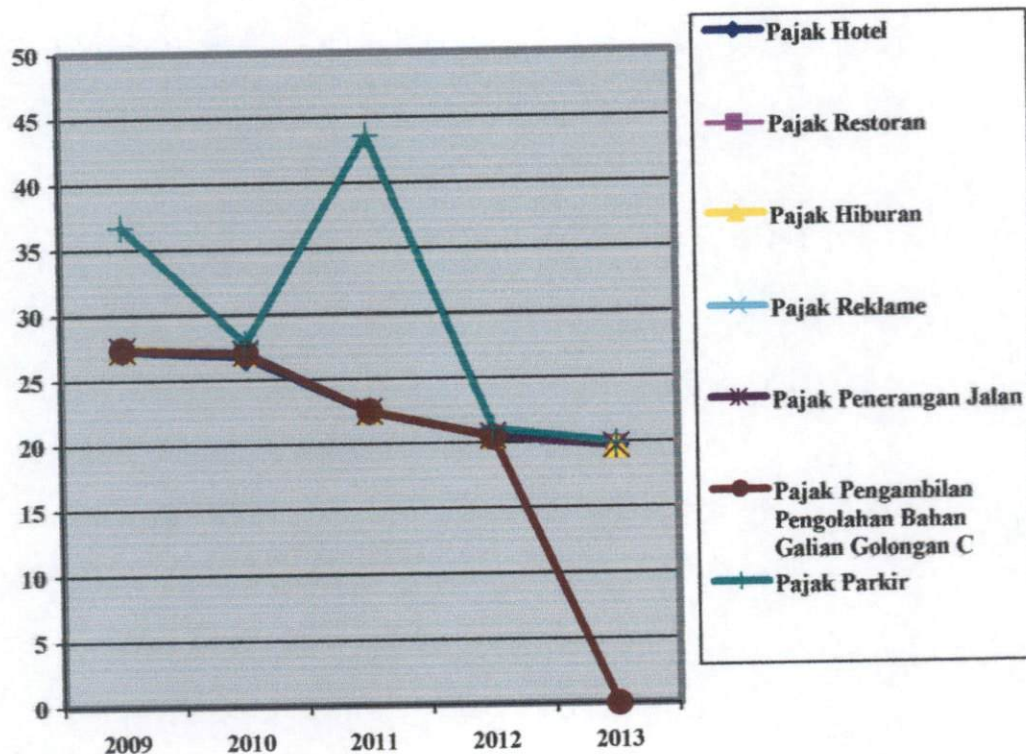
$$efisiensi = \frac{Rp. 0}{Rp. 0} \times 100\% = 0\%$$

**g. Pajak Parkir**

$$efisiensi = \frac{Rp. 1.341.214}{Rp. 6.732.900} \times 100\% = 19,92\%$$

Pada tahun 2013, semua penerimaan pajak daerah Kota Sawahlunto sangat efisien, karena tingkat pencapaian efisiensinya kecil dari 20% (<20%). Walaupun kita lihat pada data target dan realisasi PAD Kota Sawahlunto ada target

penerimaan Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, tetapi realisasinya tidak ada. Maka hasil pengukuran efisiensinya 0 (nol). Karena pengalokasian biaya terkait pemungutan pajak daerah berdasarkan pebandingan realisasi penerimaan pajak daerah. Sehingga pengalokasian biaya untuk Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebanyak 0%.



**Grafik Tingkat Pencapaian Analisis Efisiensi**

Dari tahun 2009 sampai tahun 2013, penerimaan pajak daerah Kota Sawahlunto sudah efisien. Di tahun 2009 sampai tahun 2012, tingkat pencapaian penerimaan pajaknya berada diantara 20% sampai dengan 85%, ini artinya semua pajak daerah efisien. Dan pada tahun 2013, tingkat pencapaian efisiensi penerimaan pajak daerahnya kecil dari 20 % (<20%), ini artinya penerimaan pajak pada tahun 2013 sangat efisien.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak oleh DPPKAD Kota Sawahlunto.

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah :

1. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir adalah pajak – pajak yang digolongkan kedalam Pajak Daerah berdasarkan Undang – undang nomor 28 tahun 2009.
2. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 13 juni 2013.
3. Rata – rata Tingkat Efektivitas pemungutan pajak daerah oleh DPPKAD Kota Sawahlunto tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak Hotel pada tahun 2009 mempunyai tingkat efektivitas yang sangat efektif tetapi dua tahun setelah itu yaitu dari tahun 2010 – 2011 mengalami penurunan dari 107,39% pada tahun 2009 turun menjadi 87,36% pada tahun 2010 dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2011 yaitu dengan tingkat efektivitasnya 46,17%. Akan tetapi mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2012 dengan tingkat pencapaian sebesar 199,95%



dan terus naik menjadi 174,94% pada tahun 2013. Kenaikan dan Penurunan yang signifikan ini disebabkan oleh penetapan target Pajak Hotel yang kurang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi. Karena target Pajak Hotel dari tahun 2010 ke tahun 2011 naik hampir 100%.

5. Pajak Restoran Kota Sawahlunto sepertinya memiliki potensi yang cukup besar. Karena tingkat pencapaian efektivitasnya selama lima tahun dari tahun 2009 – 2013 selalu diatas 100%, ini artinya tingkat pencapaian pemungutan pajak restoran tahun 2009 – 2013 sangat efektif.
6. Tingkat pencapaian efektivitas Pajak Hiburan selama 2009 – 2013 tidak pernah mencapai 100%, ini artinya hasil pemungutan Pajak Hiburan tidak pernah efektif.
7. Tingkat efektivitas Pajak Reklame hanya pada tahun 2013 yang mencapai atau melebihi 100% yakni 123,17%. Di tahun sebelumnya dari tahun 2009-2012, hasil pemungutan Pajak Reklame tidak efektif.
8. Pajak Penerangan Jalan memiliki potensi yang besar. Sama dengan Pajak Restoran, hasil pemungutan Pajak Penerangan Jalan memiliki tingkat pencapaian efektivitas yang sangat efektif yaitu di atas 100% dari tahun 2009 – 2013.
9. Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C mengalami penurunan efektivitas setiap tahunnya dari tahun 2009 – 2013. Dan pada tahun 2013, Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C memiliki titik atau tingkat terendah yaitu 0%, ini di akibatkan karena tidak



adanya realisasi penerimaan Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

10. Pajak Parkir mengalami penurunan dan kenaikan yang signifikan dari tahun 2009 – 2013. Dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami kenaikan yang cukup sangat signifikan yaitu dari 47,54% naik menjadi 197,43%, tetapi turun kembali di tahun 2011 menjadi 83,07% dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2012 menjadi 52,20%. Tetapi setelah itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2013 yaitu 224,43%. Dimana efektivitas Pajak Parkir pada tahun ini merupakan pajak dengan efektivitas tertinggi dari pajak – pajak lainnya dari tahun 2009 – 2013.
11. Dari tahun 2009 sampai tahun 2013 hanya Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan yang selalu mencapai tingkat efektivitas yang sangat efektif.
12. Penerimaan semua Pajak Daerah Kota Sawahlunto dari tahun 2009 – 2012 sudah efisien karena rata – rata tingkat efisiennya di tahun 2009 adalah 28,68% , tahun 2010 27,16% , tahun 2011 25,51% dan tahun 2012 20,6%.
13. Tingkat efisiensi penerimaan Pajak Daerah di tahun 2013 sangat efisien, Karena semua tingkat efisiensi Pajak Daerah Kota Sawahlunto di bawah atau kecil dari 20%.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Semua hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan evaluasi pemungutan Pajak Daerah Kota Sawahlunto bagi Pemerintah Kota dan memberikan gambaran tentang praktik pemungutan Pajak Daerah di Kota

Sawahlunto. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan – keterbatasan antara lain :

1. Penelitian ini hanya mencakup lima tahun, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan seluruh hasil pemungutan Pajak Daerah di Kota Sawahlunto.
2. Penelitian ini belum mengungkapkan semua faktor – faktor yang mempengaruhi pemungutan Pajak Daerah Kota Sawahlunto.
3. Pengalokasian seluruh biaya – biaya pemungutan Pajak Daerah berdasarkan rasio perbandingan penerimaan realisasi pajak. Sehingga biaya – biaya pemungutan pajak yang sebenarnya tidak tepat dan tidak diketahui.

### 5.3 Saran

Beberapa saran yang disampaikan penulis bertujuan agar pemungutan Pajak Daerah di Kota Sawahlunto lebih efektif dan efisien untuk kedepannya. Adapun beberapa saran tersebut adalah :

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto harus menetapkan perhitungan ulang terhadap penetapan target dan perencanaan biaya sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi agar hasil pemungutan Pajak Daerah efektif dan efisien.
2. Sebaiknya DPPKAD Kota Sawahlunto membentuk sub bidang khusus untuk memantau dan mengelola pemungutan Pajak Daerahnya.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto harus bisa untuk melengkapi dan melakukan validasi data-data yang dimiliki oleh daerah. Khususnya terkait data – data pajak daerah.

4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebaiknya memberikan penyuluhan untuk mendorong wajib pajak melakukan pembukuan, pencatatan dan pelaporan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Puspitasari, E.R. (2011). *Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009 – 2013*, Skripsi S1. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bahri F, M.S. (2011). *Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 – 2009*, Skripsi S1. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Devas, Nick. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Delina, Shyntia. (2012). *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Solok*. Skripsi S1. Padang: Universitas Andalas.
- Kuncoro, Mudarajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga
- Koswara, E. (2000). *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 [ Toward the Implementation of Regional Autonomy According to Law No. 22/1999 ]*, Paper presented at Limited Discussion at Centre for Strategic and international Studies (CSIS), Jakarta.
- Lisano, Riyant. (2012). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Hasil Pemungutan Pajak Daerah oleh DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kota Payakumbuh Sumatera Barat*. Skripsi S1. Padang: Universitas Andalas.
- Mardalis. (2003). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Bagian Kesatu Tahun 2011. (2011). *Tentang Pajak Hotel*. Sawahlunto.
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Bagian Kedua Tahun 2011. (2011). *Tentang Pajak Restoran*. Sawahlunto.
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Bagian Ketiga Tahun 2011. (2011). *Tentang Pajak Hiburan*. Sawahlunto.
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Bagian Keempat Tahun 2011. (2011). *Tentang Pajak Reklame*. Sawahlunto.
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Bagian Kelima Tahun 2011. (2011). *Tentang Pajak Penerangan Jalan*. Sawahlunto.
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Bagian Keenam Tahun 2011. (2011). *Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*. Sawahlunto.